



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 76716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 112 /SETDA/PERKEU/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) maka dilakukan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik




Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU** : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - melaksanakan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah melalui aplikasi E-SAKIP.

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
		

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Juni 2024

1/SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU, 1

MOHD. ZAINI

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

38

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 112/SETDA/PERKEU/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
①	Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	Ir. ISTIWA, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3	Dra. IWAN SETIAWAN, M.Si.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
2	4	10

1	2	3	4
4	TRIWATI, S.P., M.Si.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5	TEODOLUS TEDDY HINGGAAN, S.T.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6	Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
7	YOVINUS RIADY, S.Psi.	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8	ELIAS KINSON, S.E.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9	BUDI PRASETJO, S.T., M.M.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	WAKHID FATHONI JULIANTO, S.Kom., M.Si.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	F. ALEXANDER FARLIAN, S.E	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	Y.SINTAN, S.E., M.Ec.Dev.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
72	4	12

1	2	3	4
13	ANDREAS ARIANDOKO, S.E.	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14	FERRY FACHRUDDIN, S, A.Md.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15	MARVELAOS MARVEL, S.Farm.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16	HENDRIKUS HEN, S.H.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17	ANDI RIZKI FATURAHMAN, S.T.IP	PENATA KEPROTOKOLAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18	SUMIATI, S.E.	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
26	1	12

1	2	3	4
19	LUSIA PUSPTA RUKMANJAYA, S.E.	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20	VILARIA LAUDRA APRILIANTI, S.E	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
21	M. RAHMAN, S.Pd	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22	ADRIANUS IRWANTOTO, S.I.P	PERENCANA AHLI PERTAMA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
23	FEBY HENDRIANA, S.A.P	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24	YUDI PRATAMA HAWRIZA, S.I.P.	ANALIS PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Asisten
g	4	2

1	2	3	4
25	WANITU MARYADI	PENGADMINISTRASI UMUM PADA EMOLAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ASCOGA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI